

Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Risiko Illegal Logging: SLR Kehutanan

Dita Aulia Buata¹, Usman²

Universitas Negeri Gorontalo

Email: dbuata03@gmail.com¹, usmandamin@ung.ac.id²

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of Internal Control Systems (ICS) in mitigating illegal logging risks within the forestry industry. The research problem addresses three key aspects: the implementation of ICS, its effectiveness in reducing illegal logging practices, and the factors influencing its performance. Using a Systematic Literature Review (SLR) approach, selected studies were analyzed based on structured searches through Publish or Perish and filtered using a simplified PRISMA procedure. Findings indicate that ICS plays a strategic role in strengthening governance, enhancing fraud-prevention mechanisms, and limiting opportunities for irregularities in forest management. However, its effectiveness depends on the quality of governance practices, human resource competence, individual morality, and the consistency of law enforcement. These insights highlight the need for comprehensive strengthening of ICS to support sustainable illegal logging mitigation.

Keywords: *Internal Control System, Illegal Logging, Governance, Internal Audit, SLR.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menelaah efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam memitigasi risiko illegal logging pada industri kehutanan. Rumusan masalah difokuskan pada tiga aspek, yaitu bagaimana SPI diterapkan, seberapa efektif pengendalian tersebut dalam mengurangi praktik pembalakan liar, dan faktor apa saja yang memengaruhi efektivitasnya. Dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), studi ini menganalisis literatur terpilih yang diperoleh melalui pencarian terstruktur menggunakan Publish or Perish dan diseleksi melalui kerangka PRISMA sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPI berperan strategis dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan mekanisme pencegahan fraud, serta menutup celah penyimpangan dalam pengelolaan hutan. Namun, efektivitas SPI dipengaruhi oleh kualitas penerapan GCG, kapasitas sumber daya manusia, moralitas individu, serta konsistensi penegakan hukum. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan SPI secara komprehensif untuk mendukung upaya mitigasi illegal logging secara berkelanjutan.

Kata kunci: *Sistem Pengendalian Internal, Illegal Logging, Tata Kelola, Audit Internal, SLR.*

A. PENDAHULUAN

Upaya mencapai tata kelola kehutanan yang akuntabel pada dasarnya menuntut penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dan sistem pengendalian internal (SPI) yang memadai. Dalam kerangka ideal, GCG berfungsi sebagai landasan untuk membantu organisasi memitigasi risiko kinerja, termasuk risiko fraud dan ketidakefisienan operasional (Kenn, 2023). Implementasi GCG secara konsisten mendorong perusahaan untuk mencapai kinerja yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, terutama melalui penguatan mekanisme pengawasan dan mitigasi risiko organisasi (Kenn, 2023). Selain itu, SPI yang efektif seharusnya mampu memastikan keandalan pelaporan, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan, sebagai proses integral yang dijalankan seluruh unsur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ayem & Kusumasari, 2020).

Namun, dalam realitas di sektor kehutanan Indonesia, kondisi di lapangan menunjukkan adanya celah signifikan antara harapan normatif dan praktik aktual. Pembalakan liar masih terjadi secara meluas di berbagai provinsi meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Supardi et al., 2021). Illegal logging bahkan digambarkan sebagai kejahatan terorganisir yang melibatkan aktor intelektual sehingga menyulitkan proses penindakan hukum (Mulkan, 2023). Lemahnya efektivitas penegakan hukum tercermin pada sulitnya perkara naik ke tahap persidangan, ringannya vonis, serta fokus penjeratan pidana yang hanya menyasar pelaku lapangan (Zakariya, 2020). Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya peran sistem pengendalian internal dan mekanisme pengawasan dalam industri kehutanan, termasuk dalam konteks pencegahan fraud, korupsi, maupun praktik tidak sehat lainnya (Kuntadi et al., 2023; Nurul & Pradana, 2022; Rahman, 2020).

Kerentanan tersebut semakin dipertegas oleh temuan bahwa ketidakefisienan dan kegagalan perusahaan dalam mencapai kinerja yang sehat sering kali dipicu oleh sistem pengendalian internal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya (Arifundin et al., 2020). Padahal, SPI bukan hanya mencakup aspek akuntansi dan keuangan, tetapi mencakup seluruh kegiatan perusahaan, termasuk pengawasan delegasi wewenang yang memerlukan pemantauan berkelanjutan untuk mencegah maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan (Arifundin et al., 2020). Di sisi lain, audit internal sebagai elemen kunci pengawasan SPI memiliki peran strategis dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan, namun implementasinya masih belum optimal di banyak lembaga dan perusahaan kehutanan (Hanifah

et al., 2023; Rahman, 2020). Celah ini menunjukkan urgensi evaluasi terhadap efektivitas SPI dalam memitigasi risiko illegal logging sebagai salah satu risiko paling krusial dalam sektor kehutanan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mensintesis, dan mengevaluasi temuan-temuan ilmiah mengenai efektivitas sistem pengendalian internal dalam memitigasi risiko illegal logging pada industri kehutanan, melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Dengan melakukan telaah sistematis atas literatur yang relevan, penelitian ini berupaya menilai bagaimana SPI diterapkan, faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitasnya, serta bagaimana peran pengawasan, audit internal, dan praktik GCG berkontribusi terhadap pengurangan risiko pembalakan liar. Selain itu, penelitian ini bertujuan memetakan kesenjangan praktik dan tantangan implementasi SPI di sektor kehutanan, sehingga dapat memberikan implikasi teoritis dan praktis bagi penguatan governance.

Dibandingkan penelitian terdahulu, studi ini menawarkan kontribusi berbeda dalam beberapa aspek. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek penegakan hukum illegal logging misalnya, (Supardi et al., 2021; Zakariya, 2020) atau pada isu fraud secara umum di sektor publik dan korporasi (Kuntadi et al., 2023; Nurul & Pradana, 2022; Rahman, 2020) tanpa mengintegrasikan perspektif pengendalian internal secara spesifik dalam konteks mitigasi risiko pembalakan liar. Kedua, penelitian mengenai SPI sebelumnya banyak menyoroti efektivitasnya dalam konteks pelaporan keuangan dan efisiensi perusahaan (Arifundin et al., 2020; Hanifah et al., 2023), tetapi belum secara langsung mengaitkan SPI dengan kasus-kasus environment-related crimes seperti illegal logging. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan karena mengisi kekosongan tersebut melalui analisis literatur sistematis yang secara khusus memposisikan SPI sebagai instrumen mitigasi risiko lingkungan dan kehutanan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan mengenai efektivitas sistem pengendalian internal dalam memitigasi risiko illegal logging pada industri kehutanan. Perumusan fokus penelitian dilakukan menggunakan model PoP (Population, Problems, Phenomena) yang mencakup: populasi berupa organisasi, lembaga pemerintah, dan perusahaan kehutanan yang menerapkan sistem pengendalian internal; masalah berupa isu pembalakan liar, fraud, korupsi, serta kelemahan mekanisme pengendalian; dan fenomena berupa efektivitas sistem

.

pengendalian internal, peran audit internal, serta tata kelola dalam mitigasi risiko. Dari komponen tersebut dihasilkan tiga pertanyaan utama: **bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pada sektor kehutanan, seberapa efektif sistem tersebut dalam mengurangi risiko illegal logging, serta faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pengendalian tersebut.**

Strategi pencarian literatur dilakukan melalui Google Scholar menggunakan software Publish or Perish (PoP) dengan kata kunci: "mitigasi risiko" OR "manajemen risiko" AND "pembalakan liar" AND "sistem pengendalian internal" OR "pengendalian internal", dengan rentang tahun 2020–2025 untuk memastikan relevansi penelitian terkini. Proses seleksi artikel mengikuti alur PRISMA sederhana, di mana sekitar 600 artikel awal disaring berdasarkan judul dan abstrak hingga tersisa sekitar 12 artikel yang memenuhi kriteria, dan akhirnya diperoleh 5 artikel yang dianalisis secara penuh. Pendekatan ini mengikuti prinsip (Kitchenham & Charters, 2007) bahwa pencarian dalam SLR harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan terorganisir untuk meminimalkan bias pada tahap pengumpulan data ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sistem Pengendalian Internal pada Sektor Kehutanan

Kajian literatur mengenai pengendalian internal menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan fondasi tata kelola organisasi yang dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas operasional berjalan sesuai tujuan, perlindungan aset dilakukan secara memadai, serta kepatuhan terhadap regulasi dapat dijaga (Nurul & Pradana, 2022). SPI terdiri dari komponen-komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, sebagaimana didefinisikan dalam kerangka Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) yang menjadi rujukan global bagi berbagai sektor, termasuk sektor kehutanan (Nurul & Pradana, 2022).

Dalam konteks kelembagaan kehutanan, pengendalian internal dibangun melalui struktur organisasi, kebijakan, serta prosedur kerja yang berorientasi pada pencegahan potensi penyimpangan, termasuk kecurangan dan pelanggaran pengelolaan sumber daya hutan (Arifundin et al., 2020 dalam Nurul & Pradana, 2022). Penerapan SPI juga dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, integritas aparatur, serta komitmen pimpinan dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif (Kuntadi et al., 2023). Oleh karena itu, gambaran umum literatur menunjukkan bahwa SPI dalam sektor kehutanan tidak hanya berkaitan dengan mekanisme

administratif, tetapi juga mencakup aspek moralitas, etika, tata kelola, dan budaya organisasi.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Sektor Kehutanan

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa penerapan SPI pada sektor kehutanan pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang menekankan transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan kepatuhan sebagai dasar dari tata kelola yang baik (Kenn, 2023). Penerapan GCG dipandang penting karena mampu memperkuat integritas organisasi serta mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Pada level operasional, penerapan SPI diwujudkan melalui kebijakan anti-fraud, prosedur pencegahan standar, serta penetapan struktur organisasi yang mendukung kontrol internal secara efektif (Kuntadi et al., 2023). Audit internal berperan sebagai instrumen kunci untuk mengidentifikasi dan menginvestigasi potensi fraud, termasuk penyimpangan terkait perizinan dan pelaporan kegiatan kehutanan (Kuntadi et al., 2023).

Kerangka COSO menjadi pendekatan utama dalam menilai efektivitas SPI di instansi kehutanan (Nurul & Pradana, 2022). Komponen penilaian risiko, misalnya, mendorong lembaga untuk mengidentifikasi potensi ancaman terhadap tujuan pengelolaan hutan, termasuk penebangan liar, penyalahgunaan izin, dan manipulasi data produksi kayu (Kuntadi et al., 2023). Selain itu, aktivitas pengendalian seperti verifikasi dokumen, inspeksi lapangan, dan penggunaan sistem informasi kehutanan menjadi bagian dari mekanisme penting yang mendukung akurasi pelaporan dan kepatuhan atas proses perizinan.

Dengan demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa sektor kehutanan telah mengadopsi SPI dalam konteks yang lebih strategis dan komprehensif, terutama melalui integrasi GCG, pengawasan internal, dan manajemen risiko yang sistematis.

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dalam Mengurangi Risiko Illegal Logging

Literatur memperlihatkan bahwa illegal logging merupakan ancaman serius dengan dampak ekologis dan ekonomi yang signifikan. Zakariya, (2020) menjelaskan bahwa pembalakan liar menyebabkan penyusutan hutan sebesar 1,1 juta hektare per tahun dan kerugian negara mencapai Rp 276,4 triliun pada tahun 2016. Besarnya dampak tersebut menunjukkan perlunya mekanisme pengendalian yang mampu mendeteksi dan mencegah praktik ilegal secara lebih efektif.

SPI terbukti memainkan peran penting dalam menutup celah terjadinya fraud dan penyimpangan pada kegiatan kehutanan. Aktivitas penilaian risiko dan pengawasan internal menciptakan lingkungan kendali yang stabil sehingga kecurangan lebih mudah terdeteksi dan sulit untuk dilakukan (Pane, 2018 dalam Nurul & Pradana, 2022). SPI yang diterapkan secara

memadai juga memungkinkan adanya kontrol berlapis berupa verifikasi administrasi, pengawasan lapangan, serta pemeriksaan sistem informasi perizinan.

Meskipun demikian, efektivitas SPI dalam memitigasi illegal logging belum optimal karena beberapa faktor eksternal, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya alat bukti, serta keterbatasan kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pembalakan liar (Zakariya, 2020). Banyak perkara pembalakan liar yang tidak berhasil naik ke tahap persidangan, menunjukkan bahwa pengendalian internal di sektor kehutanan harus diperkuat oleh sistem hukum yang mampu menindaklanjuti temuan internal secara konsisten.

Selain itu, praktik korupsi seperti suap kepada aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait turut memperlemah efektivitas SPI karena membuka celah penyimpangan pada level implementasi (Zakariya, 2020). Dengan demikian, meskipun SPI memiliki kerangka yang kuat, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh integritas pelaksana, dukungan penegakan hukum, serta ketegasan dalam pelaksanaan standar operasional kehutanan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Hasil literatur menunjukkan bahwa efektivitas SPI dalam memitigasi risiko illegal logging dipengaruhi oleh beberapa faktor utama.

Pertama, tata kelola organisasi (GCG) merupakan faktor dominan yang memperkuat kontrol internal. Implementasi GCG mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pemisahan wewenang yang jelas sehingga mengurangi risiko manipulasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan hutan (Kenn, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG secara konsisten mampu menutup peluang terjadinya kecurangan dan meningkatkan keandalan proses organisasi (Nurul & Pradana, 2022).

Kedua, moralitas individu turut memengaruhi efektivitas SPI. Kuntadi et al., (2023) menegaskan bahwa semakin tinggi moralitas individu, maka semakin besar upaya pencegahan fraud yang dapat dilakukan, termasuk dalam konteks pelanggaran kehutanan (Kuntadi et al., 2023). Moralitas berperan dalam menentukan keputusan etis pada kondisi dilema, sehingga menjadi lapisan penting dalam menghindari tindakan illegal logging atau keterlibatan dalam jaringan pembalakan liar.

Ketiga, kompetensi sumber daya manusia dan kemampuan mendeteksi risiko juga berpengaruh signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa kelemahan deteksi risiko, ketidakpedulian pegawai, dan rendahnya pemahaman terhadap regulasi menjadi penyebab pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan pada pencegahan fraud (Adiko & Astuty, 2019 dalam Nurul & Pradana, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur dan pelatihan berkelanjutan merupakan prasyarat bagi efektivitas SPI.

Keempat, sistem hukum dan penegakan regulasi juga menentukan keberhasilan SPI. Lemahnya pembuktian perkara illegal logging dan praktik suap dalam proses penegakan hukum mengurangi efektivitas pengendalian internal karena temuan internal tidak dapat ditindaklanjuti secara optimal (Zakariya, 2020). Oleh sebab itu, integrasi SPI dengan sistem hukum yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat diproses sesuai ketentuan.

Secara keseluruhan, hasil SLR menunjukkan bahwa efektivitas SPI tidak hanya ditentukan oleh desain sistemnya, tetapi juga oleh tata kelola, integritas individu, kapasitas organisasi, serta konsistensi penegakan hukum pada sektor kehutanan.

D. KESIMPULAN

Hasil tinjauan literatur sistematis menunjukkan bahwa efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam memitigasi risiko illegal logging pada industri kehutanan sangat ditentukan oleh kualitas penerapannya, yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi, dan pemantauan. SPI yang terstruktur dan didukung prinsip Good Corporate Governance terbukti mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pencegahan fraud sehingga dapat menutup celah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan hutan. Namun demikian, efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti integritas dan moralitas individu, kompetensi sumber daya manusia, kemampuan deteksi risiko, serta konsistensi penegakan hukum terhadap tindak illegal logging. Dengan demikian, penguatan SPI perlu dilakukan secara komprehensif melalui pengembangan tata kelola, peningkatan kapasitas aparatur, serta integrasi sistem pengawasan internal dengan mekanisme penegakan hukum agar upaya mitigasi illegal logging dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiko, R. G., & Astuty, W. (2019). Pengaruh Pengendalian Intern , Etika Auditor , dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud PT . Inalum. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 2(1), 52–68.
- Arifundin, O., Juhadi., & Sofyan, Y. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Audit Internal terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 16(2), 17–32.
- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Mediasi*. 10 (2), 160–169.
- Hanifah, A. M., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature Review : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal , Peran Audit Internal , Komitmen Manajemen terhadap Good Corporate Governance. *Jurnal Economina*, 2, 1318–1330.
- Kenn, Z. (2023). Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai Mitigasi Risiko Manajemen Kinerja Organisasi. *Jurnal Manajemen Risiko*, Vol. 4 No., 117–130.
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*.
- Kuntadi, C., Meilani, A., & Velayati, E. (2023). *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal , Kompetensi Sumber Daya Manusia , dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud*. 4(4), 651–662.
- Mulkan, H. (2023). Strategi Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Kasus Pembalakan Liar/Illegal Logging. *Jurnal Hukum Uniski*, Vol. 12
- Nurul, S., & Pradana, K. (2022). *Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud*. 10(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1328>
- Pane, A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kecurangan: Survei pada Pemprov Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 40–48.
- Rahman, K. G. (2020). Sistem Pengendalian Internal dan Peran Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 3, 20–27.
- Supardi, I. M., Dewi, A. A., & Suyani, L. (2021). *Peran Polisi Hutan dalam Menanggulangi Pembalakan Liar/Illegal Logging dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali*. 2(1), 81–85.
- Zakariya, R. (2020). *Optimalisasi Penelusuran Aset dalam Penegakan Hukum Pembalakan Liar oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. 8, 159–175.